

Original Research Paper

Sosialisasi Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua di Kecamatan Pringgabaya

Muhammad Jailani^{1*}, M. Faisal¹, M. Hotibul Islam¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mataram

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmi.v8i3.13137>

Situs: Jailani, M., Faisal, M., & Islam, M. H. (2025). Sosialisasi Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua di Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(3)

Article history

Received: 7 Mei 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 30 September 2025

*Corresponding Author:
Muhammad Jailani, Fakultas
Hukum, Universitas Mataram
Email: mjailani@unram.ac.id

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai peran strategis Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Kedua, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat dan Pendamping PKH mengenai pentingnya tugas pendamping dalam memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan efektif. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program, sehingga manfaat PKH dapat dirasakan secara maksimal oleh KPM. Melalui pendekatan partisipatif, pengabdian ini mencakup penyampaian materi tentang konsep HAM Generasi Kedua, strategi pemberdayaan sosial, dan penguatan kapasitas Pendamping PKH dalam mendukung kesejahteraan sosial. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi, pelatihan, dan simulasi, serta mendokumentasikan praktik terbaik yang dapat diterapkan secara luas. Dengan metode deskriptif kualitatif, sosialisasi ini dirancang untuk membangun sinergi antara pendamping, KPM, dan berbagai pihak terkait di Kecamatan Pringgabaya. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas pendamping dalam melaksanakan peran mereka, serta penguatan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Keywords: Pendamping PKH; Program Keluarga Harapan; Kesejahteraan Sosial; HAM Generasi

Pendahuluan

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu wilayah di ujung timur Pulau Lombok yang memiliki kondisi sosial ekonomi cukup kompleks. Dengan jumlah penduduk yang besar dan sebagian besar di antaranya bekerja di sektor agraris, Kecamatan

Pringgabaya menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Desa Apitaik, salah satu desa di kecamatan ini, menjadi fokus perhatian karena banyaknya keluarga yang hidup dalam kondisi miskin dan rentan.

Sebagian besar penduduk Desa Apitaik bermata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang tidak menentu, sementara banyak

perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga akibat kehilangan pasangan hidup. Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di desa ini, yang didampingi oleh empat orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam menyediakan akses terhadap bantuan sosial yang bersifat kondisional. Namun, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan utama dalam implementasi PKH di Desa Apitaik mencakup beberapa aspek mendasar. Pertama, adanya ketidaktepatan sasaran dalam pendataan keluarga miskin. Banyak keluarga yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima manfaat justru tidak tercatat, sementara keluarga yang tidak berhak kadang mendapatkan bantuan. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi kendala besar. Banyak KPM yang hanya menerima bantuan secara pasif tanpa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat. Ketiga, akses masyarakat terhadap informasi mengenai program ini juga sangat terbatas, sehingga banyak dari mereka tidak mengetahui manfaat yang lebih luas dari PKH. Keempat, para pendamping PKH seringkali menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, mulai dari kurangnya pelatihan hingga beban kerja yang tinggi karena harus mendampingi ratusan keluarga dalam waktu yang terbatas.

Meski demikian, Desa Apitaik memiliki potensi besar untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi PKH. Keberadaan pendamping PKH yang berdedikasi, meskipun jumlahnya terbatas, telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan sosial lainnya. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa serta partisipasi aktif dari beberapa kelompok masyarakat memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan program dan mencapai dampak yang lebih besar, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis. Sosialisasi mengenai peran pendamping PKH perlu diperkuat, sehingga para pendamping dapat menjalankan fungsi mereka secara optimal sebagai

agen perubahan sosial. Dalam konteks ini, fokus pada peningkatan hak asasi manusia (HAM) Generasi Kedua, yang mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, menjadi sangat relevan. Hak-hak ini meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak, yang semuanya merupakan inti dari tujuan PKH.

Metode

Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

- Identifikasi Peserta dan Penyusunan Materi**
 - Mengidentifikasi jumlah peserta sosialisasi (pendamping PKH dan perwakilan KPM).
 - Menyusun materi dalam bentuk presentasi, infografis digital, dan modul yang berisi informasi ringkas.

2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

- Berkoordinasi dengan pemerintah desa, pendamping PKH, dan tokoh masyarakat untuk persiapan lokasi dan jadwal kegiatan.
- Memastikan ketersediaan fasilitas seperti proyektor, tempat duduk, dan alat tulis.

3. Pengadaan Media Pendukung

- Menyiapkan materi presentasi yang interaktif (termasuk video singkat jika memungkinkan).
- Menyediakan media visual (poster atau infografis) yang mudah dipahami.

2. Tahap Pelaksanaan

Durasi: 1 Hari

1. Pembukaan (30 Menit)

- Sambutan dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat.
- Penjelasan tujuan kegiatan dan agenda sosialisasi kepada peserta.

2. Sesi Edukasi dan Diskusi Terbuka (3 Jam)

- Materi Sosialisasi yang Disampaikan:**

- Penjelasan tentang Program Keluarga Harapan (PKH): Tujuan, manfaat, dan hak KPM.
- Peran pendamping PKH: Fasilitasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- Konsep HAM Generasi Kedua: Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial.

b. Metode Penyampaian:

- Presentasi menggunakan media digital (projektor dan infografis).
- Tanya jawab interaktif untuk melibatkan peserta.

c. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD):

- Membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil (maksimal 10-15 orang).
- Masing-masing kelompok mendiskusikan pengalaman, tantangan, dan kebutuhan terkait PKH.
- Fasilitator mencatat rekomendasi dan solusi yang diusulkan oleh peserta.

3. Evaluasi Pemahaman Peserta (30 Menit)

- Menggunakan kuesioner atau kuis singkat untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
- Diskusi plenary untuk mendapatkan masukan dan klarifikasi dari peserta.

3. Tahap Penutupan

1. Kesimpulan dan Rekomendasi (30 Menit):

- Memaparkan ringkasan hasil sosialisasi, termasuk rekomendasi dari diskusi kelompok.
- Memberikan panduan tindak lanjut bagi pendamping PKH dan KPM.

2. Penutupan (15 Menit):

- Ucapan terima kasih dari

- penyelenggara dan tokoh masyarakat.
- Pembagian materi edukasi dalam bentuk digital atau cetak sederhana (jika tersedia).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pringgabaya berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari para pendamping. Sosialisasi ini berfokus pada perluasan peran pendamping yang tidak hanya sebagai penyalur bantuan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua—yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan evaluasi awal, mayoritas pendamping sebelumnya memandang tugas mereka secara terbatas pada aspek administratif dan memastikan kehadiran peserta di fasilitas kesehatan dan pendidikan. Melalui kegiatan ini, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan di mana pendamping mulai menyadari bahwa intervensi mereka dapat berdampak lebih mendalam dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan lebih lanjut, terungkap bahwa pendamping adalah ujung tombak dalam mewujudkan hak-hak generasi kedua bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peran mereka menjadi krusial dalam memastikan bahwa anak-anak dari keluarga PKH tidak hanya bersekolah, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mendukung pengembangan diri mereka (hak atas pendidikan). Demikian pula, pendamping dituntut untuk memastikan bahwa akses layanan kesehatan dimanfaatkan sepenuhnya, termasuk pemahaman tentang gizi, sanitasi, dan kesehatan reproduksi (hak atas kesehatan). Sosialisasi ini menekankan bahwa pemenuhan hak-hak ini adalah fondasi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendamping dilatih untuk menjadi fasilitator yang memberdayakan, bukan sekadar pengawas, dengan menggunakan pendekatan dialogis dan empatik dalam setiap kunjungan lapangan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas pendamping dalam mengidentifikasi dan merespons isu-isu HAM

generasi kedua yang spesifik di wilayahnya. Sebagai contoh, pendamping menjadi lebih peka dalam mendeteksi kasus putus sekolah, perkawinan anak, atau kesulitan akses terhadap air bersih yang dialami KPM. Mereka kemudian dibekali dengan pengetahuan tentang jalur rujukan yang tepat, baik ke pemerintah desa, dinas sosial, maupun lembaga layanan lainnya. Dengan demikian, pendamping tidak lagi berjalan sendiri, tetapi menjadi penghubung yang vital antara keluarga miskin dengan jaringan perlindungan sosial yang tersedia. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem dukungan yang komprehensif bagi peningkatan kesejahteraan KPM.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini berhasil memperkuat kerangka kerja pendampingan PKH yang berorientasi pada HAM. Pendekatan baru ini menempatkan KPM sebagai subjek yang memiliki hak untuk ditingkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar objek penerima bantuan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya kemandirian keluarga dan terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak sebagai generasi penerus. Keberlanjutan dari inisiatif ini perlu dijaga melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan di Kecamatan Pringgabaya, sehingga peran strategis pendamping PKH dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi telah berhasil mentransformasi persepsi dan kapasitas pendamping PKH di Kecamatan Pringgabaya, dari yang semula berfokus pada tugas administratif menjadi agen pemberdayaan yang proaktif. Pendamping kini menyadari peran strategis mereka dalam menjembatani pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua—khususnya hak atas pendidikan dan kesehatan—bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendekatan yang berorientasi pada HAM, pendamping tidak hanya memastikan akses layanan, tetapi juga memberdayakan keluarga untuk keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya ini merupakan investasi jangka panjang

untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan membangun kesejahteraan sosial yang inklusif di Kecamatan Pringgabaya, yang kelestariannya perlu didukung melalui program pendampingan dan koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus yang ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Mataram, yang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memberikan dukungan pendanaan penuh sehingga kegiatan sosialisasi "Peran Pendamping PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan HAM Generasi Kedua" di Kecamatan Pringgabaya dapat terselenggara dengan sukses. Dukungan finansial dan kelembagaan ini bukan hanya menjadi enabler terlaksananya kegiatan, tetapi juga merupakan bukti nyata komitmen Universitas Mataram dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan Anggota IKAPI, Bandung, 2008
- Alston Philip, dan Franz Magnis Suseno (Kata Pengantar), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Badrun Susantyo, Optimalisasi Peran dan Pendamping Sosial, pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI), Jakarta, 2018
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, cetakan keempat, Bandung, 2008.
- Intihaul Khiyarah, Menggapai Kesejahteraan Keluarga, Darul Hikmah, Jogjakarta, 2017
- Jim Ife dan Frank Tesoriore, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globaliasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Modul Panduan Teknis Pelaksanaan p2k2.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH),(Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016

Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010
Sarwono, S.W, Teori – Teori Psikologi Sosial, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2012
Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat (dalam perspektif kebijakan publik), Alfabeta, Bandung, 2013

<http://nasional.sindonews.com-bonusdemografi-PKH/read/1390767/15//> Diakses 20 Oktober 2022

E-journal: Chriswardani Suryawati, 2005, “Memahami kemiskinan secara multidimensional” jurnal JMPK, 8 (3), 122, <https://jurnal.ugm.ac.id//pdf>, Diakses 10 November 2022

E-journal: Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty. 2017. “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”. Jurnal Prosiding Ks:Riset & PKM, 4(1), 90, <https://jurnal.unpad.ac.id//pdf> Diakses 20 April 2023.

E-Book: Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Kesejahteraan Rakyat. 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Kepmensos N0.8/HUK/1981 tentang Pekerja Sosial.